



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor 234-07-15/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada Nimran Abdurahman, S.H.,M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
APBL Nomor 234-07-15/APBL-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Beringin Karya (Berkarya)(Partai Politik)
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	4 rangkap copy; berkas asli ada di Prov. Aceh. Mohon melengkapi permohonan per Provinsi (asli dan copy).
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	ada
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	Tanda tangan lengkap.
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	TIDAK ADA.
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	4 rangkap copy; berkas asli ada di Prov. Aceh. Mohon melengkapi Surat Kuasa per Provinsi (asli dan copy).
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	(berkas asli ada di Prov. Aceh)
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	(berkas asli ada di Prov. Aceh)

	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	Tanda tangan lengkap.
4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	TIDAK ADA. Mohon melengkapi Daftar Alat Bukti per Provinsi (asli dan copy).
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	TIDAK ADA. Mohon melengkapi Alat Bukti Surat atau Tertulis per Provinsi (asli dan copy).
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	TIDAK ADA	TIDAK ADA
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	TIDAK ADA	TIDAK ADA
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	TIDAK ADA
7. Penyimpanan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i>).	1. 1 unit	WAJIB	TIDAK ADA	TIDAK ADA. Mohon menyerahkan flashdisk per Provinsi.
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	TIDAK ADA	TIDAK ADA

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.